

Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan dalam Upaya Menggerakkan Ekonomi Perdesaan

Increasing Added Value of Leading Products in an Effort to Drive the Rural Economy

Zainal Abidin^{1*}

¹Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

*zaidinsidik@gmail.com

Zainal Abidin^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

* zaidinsidik@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan, mengingat sebagian besar penduduk miskin di Indonesia tinggal di desa. Inisiasi Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) melalui pendanaan Dana Desa yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), merupakan gagasan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, berdasarkan potensi yang ada di setiap wilayah. Gagasan ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di beberapa kawasan di tanah air. Webinar Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan dalam Menggerakkan Ekonomi Perdesaan ini dilaksanakan untuk bertukar pengalaman dengan para praktisi dan akademisi, untuk mendapatkan pembelajaran yang bisa dilaksanakan di daerah masing-masing. Beberapa rekomendasi telah dihasilkan, antara lain menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat desa, pemanfaatan sumber daya setempat dan membangun kolaborasi untuk tujuan bersama.

Kata kunci — Produk Unggulan, Nilai tambah, Bumdes, Bumdesma

ABSTRACT

Village development is a measure of the success of development, considering that most of the Indonesian people live in villages. The initiation of Rural Area Superior Products (Prukades) through Dana Desa, involving Village-Owned Enterprises (Bumdes) and Joint Village-Owned Enterprises (Bumdesma), is a big idea to improve the welfare of rural communities, based on the potential in each region. This idea has been implemented by the Ministry of Villages, Underdeveloped Regional Development and Transmigration in several areas in the country. This webinar on Increasing the Added Value of Superior Products in Driving the Rural Economy is held to exchange experiences with practitioners and academics, to gain lessons that can be implemented in their respective regions. Several recommendations have been made, including fostering an attitude of self-reliance in village communities, utilizing local resources and building collaboration for common goals.

Keywords — Joint Village-Owned Enterprises, Superior Product, Value added, Village-Owned Enterprises

 OPEN ACCESS

© 2023. Zainal Abidin



Creative Commons
Attribution 4.0 International License

1. Pendahuluan

Jumlah desa atau kelurahan di Indonesia tahun 2020 adalah 74.961 desa [1]. Jumlah itu seharusnya berpotensi menjadikan desa sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sayangnya, hingga kini isu kemiskinan belum terselesaikan, sehingga potensi itu justru menjadi masalah yang harus diatasi.

Komposisi jumlah penduduk yang tinggal di desa dan kota, ternyata sudah bergeser. Tahun 2019, penduduk yang tinggal di kota berjumlah 150,9 juta orang, atau 55,8% [2]. Pada tahun 2010, 118,3 juta penduduk (49,8%) tinggal di kota [3]. Sampai bulan September 2020 penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang, atau 10,19 persen dari total penduduk Indonesia. Peningkatan penduduk miskin di perdesaan sebesar 13,20 persen, sedangkan di perkotaan hanya 7,88 persen [4].

Terkonsentrasinya penduduk miskin di perdesaan, serta pergeseran komposisi penduduk di desa dan kota, merupakan masalah tersendiri yang harus diselesaikan. Data tersebut menunjukkan bahwa desa yang seharusnya menempati posisi strategis sebagai penyangga kekuatan pembangunan tingkat nasional, mulai ditinggalkan. Agar kondisi ini tidak semakin buruk, strategi pembangunan di desa untuk mengatasi kemiskinan harus diprioritaskan.

Sejak diluncurkan tahun 2015, Dana Desa berkontribusi besar dalam pembangunan kawasan perdesaan. UU Nomor 6/2014 tentang Desa memberi peluang kepada kepemimpinan desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan [5], dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sehingga penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat segera terwujud [6]. Pengelolaan Dana Desa merupakan serangkaian kegiatan dan mekanisme yang meliputi: penganggaran serta perencanaan Dana Desa, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan,

pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan, pemantauan serta evaluasi.

Sejak Desember 2016, Kemendes PDTT mengembangkan Program Prukades. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan program tersebut. Prukades merupakan upaya inisiasi produk unggulan guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat maupun usaha yang diprakarsai desa [7]. Besarnya jumlah desa di Indonesia, dengan sumber daya yang berbeda-beda, mengharuskan setiap desa atau kawasan berkonsentrasi pada satu atau dua produk tertentu, dan mengembangkannya dengan konsep nilai tambah. Produk atau komoditas unggulan merupakan produk andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah sesuai dengan potensi yang ada [8].

Fokus kegiatan Prukades terutama pada peningkatan nilai tambah produk, dengan memberi bantuan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peralatan penunjang lain yang akan meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan. Prukades adalah upaya membentuk, memperkuat, dan memperluas skala ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau kawasan yang dikelola berdasarkan kerjasama antar desa [9]. Keberadaan program Prukades diharapkan akselerator pertumbuhan ekonomi perdesaan sekaligus menjadi solusi atas dua masalah penting, yaitu permodalan dan keterbatasan akses pasar [10].

Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, seperti Bumdes atau Bumdesma, pihak swasta, Perbankan, Pemerintah Desa, dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan Prukades [11]. Dengan berjejaring, Prukades



diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta membuka peluang kerja yang lebih besar di kawasan perdesaan. Pada gilirannya, upaya ini bisa mengatasi kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat desa secara sistemik.

Dalam konteks ini, webinar ‘Peningkatan Produk Unggulan dalam Menggerakkan Ekonomi Perdesaan’ sangat relevan untuk dilaksanakan. Budaya masyarakat desa yang latah meniru produk unggulan desa lain, perlu diubah dengan pengembangan inovasi dan kreativitas dalam mencipta produk unggulan berbasis potensi kawasan perdesaan itu sendiri. Kerja-kerja individual seperti yang selama ini dilakukan, yang membuka peluang masuknya peran rentenir dan tengkulak, harus dieliminir dengan kerjasama yang saling menguntungkan di antara para pemangku kepentingan. Webinar ini juga akan menjadi sarana berbagi pengalaman di antara akademisi, praktisi dan pelaku pemberdayaan masyarakat perdesaan yang sudah berhasil, sehingga bisa diduplikasi di wilayah lainnya.

2. Target dan Luaran

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memiliki target dan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan motivasi kepada para pelaku pemberdayaan masyarakat, Bumdes dan Bumdesma untuk terus berkarya sekalipun masa pandemi belum berakhir,
- Memberikan pengenalan cara-cara terobosan dalam pengembangan produk unggulan berbasis kawasan perdesaan, dan
- Memberi wawasan baru tentang pentingnya berjejaring kepada para pelaku pemberdayaan masyarakat, Bumdes atau Bumdesma.

3. Metodologi

Kegiatan webinar pengabdian masyarakat berjudul ‘Peningkatan Produk

Unggulan dalam Menggerakkan Ekonomi Perdesaan’ yang diselenggarakan oleh Kemendes PD TT, yang bekerjasama dengan lembaga amal zakat nasional Dompot Dhuafa, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, dengan menggunakan *platform Zoom Meeting*, dan ditayangkan juga di *youtube.com*. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kementerian PD TT, Ir. Herlina Sulistyorini, M.Si. merupakan pembicara kunci pada webinar ini. Beberapa pembicara yang dihadirkan terdiri dari Prof. Ahmad Erani Yustika (Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang), Drs. Luthfy Latief, M.Si. (Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Kemendes PD TT), Hiparta Nursalam (Pengurus Bumdesma Ijen Mandiri, Banyuwangi) dan Ir. Zainal Abidin, MM., Praktisi pemberdayaan masyarakat, Direktur Utama PT Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa, akademisi STEI Indonesia Jakarta dan mentor Rumah Kemasan Zona Madina (Susunan acara terlampir).



Gambar 1. Poster acara webinar ‘Peningkatan Produk Unggulan dalam Menggerakkan Ekonomi Perdesaan’

Webinar dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- Ceramah
Para pemateri menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya dalam program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi perdesaan dan peningkatan nilai tambah produk untuk menghasilkan Prukades.



b. Diskusi dan tanya jawab

Setelah para pemateri menguraikan makalahnya, dibuka forum diskusi untuk mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi yang terkait dengan Prukades.

Sasaran peserta seminar ini adalah jejaring Bumdes dan Bumdesma, para pemerhati pemberdayaan masyarakat perdesaan, pengelola Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian pada pengembangan kawasan perdesaan, pengusaha UMKM sumber daya perdesaan dan masyarakat umum yang berminat mengikuti acara ini. Undangan disampaikan melalui email maupun poster yang diunggah di berbagai sosial media seperti *Facebook* dan *Instagram* (Gambar 1). Berdasarkan daftar pada aplikasi *Zoom Meeting*, jumlah peserta yang hadir mencapai jumlah 540 orang, sedangkan yang menyaksikan acara melalui situs *youtube.com* berjumlah 925 orang.

4. Pembahasan

Webinar ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya Kemendes PDTT dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Dalam webinar ini, panitia, pembicara dan para peserta akan berdiskusi untuk menggali ide-ide, pemikiran dan inovasi, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi di kawasan perdesaan. Dalam paparannya, pembicara kunci menyampaikan bahwa sepanjang keberadaan Kemendes PDTT, inisiasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan (Gambar 2). Kemendes PDTT mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara desa-desa, untuk meningkatkan produktivitas bersama sehingga tidak terjadi kanibalisme antara satu desa terhadap desa yang lain. Kementerian juga memiliki indeks pembangunan kawasan perdesaan yang memuat indikator dan variabel kelembagaan, ekonomi, jejaring dan

prasarana di berbagai wilayah di tanah air. Dalam kondisi pandemi, muncul berbagai kesulitan dalam anggaran, identifikasi rencana dan pelaksanaan kegiatan, tetapi Kementerian berusaha mengoptimalkan potensi yang sudah ada di kawasan perdesaan, dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan dalam mengawal berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam keterbatasan, Kementerian berusaha untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Paparan pembicara kunci, Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ir. Herlina Sulistyorini, M.Si.

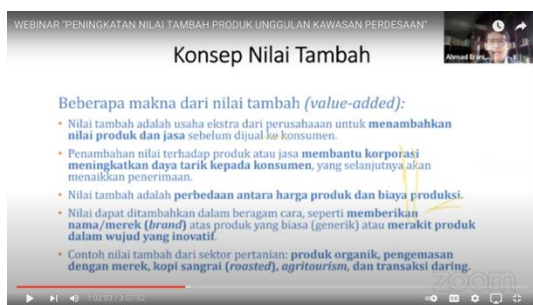
Kementerian berharap agar para peserta webinar mendapat informasi dan perkembangan secara langsung dari tangan pertama, terkait pembangunan perdesaan. Apa yang sudah dicapai seharusnya bisa dipertahankan, atau ditingkatkan secara berkelanjutan. Kementerian juga berharap, dengan era digitalisasi dan *e-marketing*, produk-produk perdesaan bisa dipasarkan secara lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Webinar diharapkan menjadi sarana terobosan dalam mencari dan menemukan alternatif kreatif untuk terus berkontribusi pada pembangunan perdesaan.

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberi kewenangan yang cukup besar sehingga desa memiliki otoritas yang luar biasa, yang perlu diimbangi dengan pengetahuan yang setara. Kewenangan tanpa pengetahuan akan menimbulkan persoalan besar.

Pembangunan ekonomi desa seringkali berkaitan dengan skala, baik saat ini maupun yang akan datang. Aktivitas dengan skala ekonomi tinggi terbukti lebih mampu bertahan, bahkan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Tingginya skala ekonomi akan menghasilkan produk secara efisien, dengan harga kompetitif. Di sini, para pengelola Bumdes dan Bumdesma perlu memahami konsep nilai tambah (*value-added*) sebagai berikut:

- Nilai tambah adalah usaha ekstra dari perusahaan untuk meningkatkan nilai produk sebelum dijual ke konsumen
- Peningkatan nilai tambah produk akan meningkatkan daya tarik konsumen, pendapatan dan keuntungan
- Nilai tambah adalah selisih biaya produksi dan harga produk tersebut. Semakin tinggi selisihnya, maka keuntungan semakin tinggi
- Nilai dapat ditambahkan dalam beragam cara, seperti memberi merek (*brand*) atas produk yang biasa (*generik*) atau membuat produk yang inovatif.

Contoh nilai tambah dari sektor pertanian: produk organik, pengemasan dengan merek, proses sangrai kopi (*roasted*), agritourism, dan transaksi digital (Gambar 3).



Gambar 3. Paparan pembicara kunci dari Universitas Brawajaya, Prof. Ahmad Erani Yustika

Sebagai ilustrasi, misalnya Bumdes A mampu memproduksi 1.000 unit produk dalam satu hari, sementara Bumdes B mampu memproduksi produk yang sama sebanyak 5.000 unit. Dengan kapasitas produksi lebih besar, Bumdes B bisa menjual produk dengan harga yang lebih

murah. Bumdes A mungkin ingin meningkatkan kapasitas produksi, tapi mengalami kendala bahan baku. Dalam konteks ini, kerjasama kawasan diperlukan.

Ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk menyusun nilai tambah:

- Identifikasi dan kalkulasi sumber daya ekonomi yang akan diberi nilai tambah.
- Penyiapan modal dan inovasi sebagai dasar penciptaan nilai tambah.
- Desain organisasi ekonomi dan pola kolaborasi untuk mewujudkan nilai tambah yang telah disepakati.
- Membangun konsensus antar pelaku (pemangku kepentingan) untuk menjalankan proyek nilai tambah.
- Menciptakan promosi, rantai pasok dan distribusi yang efektif sehingga produk dibeli oleh konsumen.

Konsumen di wilayah perkotaan kini memiliki ekspektasi yang tinggi dalam mengonsumsi produk, baik dalam hal kualitas maupun yang berkaitan dengan kesehatan. Untuk itu, para produsen di kawasan perdesaan harus melakukan adaptasi dan antisipasi, agar produk mereka bisa disukai konsumen. Di masa lalu misalnya, para petani memetik biji kopi secara acak, menjemur lalu menjualnya dalam bentuk biji mentah. Hasilnya adalah kopi berkualitas rendah, sehingga harganya sangat murah. Kini, sudah ada petani kopi yang mampu menata proses produksi kopi dengan kualitas yang baik, mulai dari pemetikan biji kopi terbaik, penjemuran yang standar, pengolahan biji kopi dengan teknologi madya atau tinggi, hingga pemberian merek dengan teknologi pengemasan modern. Proses produksi kopi-kopi berkualitas tinggi ini tentu membutuhkan dana investasi besar, tapi diimbangi dengan pasar yang luas di dalam dan luar negeri. Investasi itu diharapkan bisa kembali sekaligus menghasilkan keuntungan.

Kepala desa beserta jajarannya, termasuk pengurus Bumdes diharapkan mampu mendesain organisasi berbasis ekonomi dengan kolaborasi yang solid. Hal

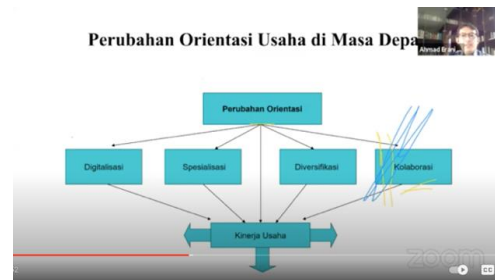
ini bukan hal mudah, karena seringkali terjadi konflik kepentingan. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara para pengurus, pengawas dan pelaksana harus disepakati sejak awal. Segala permasalahan yang muncul, harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu, orientasi usaha Bumdes harus diadaptasi dengan kondisi terkini.

Ada 4 hal yang harus dilakukan agar Bumdes dan Bumdesma tidak tersingkir dalam arus perubahan. Pola transaksi *online* yang didorong oleh kondisi pandemi perlu diantisipasi sebagai langkah utama. Tren digitalisasi bisa dimanfaatkan untuk menata kembali rantai pasok yang lebih efisien, termasuk mengeliminir keberadaan rentenir dan tengkulak yang selama ini banyak menikmati keuntungan dari transaksi produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa unit usaha yang antisipatif dan adaptif terhadap perubahan, ternyata mampu tumbuh di masa krisis pandemi Covid-19. Sebaliknya, unit usaha yang gagap teknologi dan terlambat mengantisipasi perubahan, menjadi pelaku ekonomi yang terpuruk.

Setiap desa di tanah air memiliki keunggulan komparatif yang berbeda karena potensi sumber dayanya juga berbeda, sehingga produk yang dihasilkan tidak harus sama. Untuk itu, langkah kedua adalah menetapkan spesialisasi produk sesuai dengan potensi desa harus dilakukan. Langkah ketiga adalah diversifikasi, tapi bukan penambahan jenis produk dari bahan yang berbeda, tetapi inovasi aneka produk dari bahan baku yang sama.

Terakhir adalah kolaborasi, bukan hanya antar desa tetapi juga antar berbagai pihak yang berkepentingan. Harga mesin yang mahal bisa dibeli dengan dana bersama, dan digunakan bersama-sama pula. Antara Bumdes atau Bumdesma bisa membangun konsensus dalam kerjasama kemitraan dengan posisi yang setara. Model pembangunan pedesaan di Tiongkok, Korea

Selatan atau Jepang, menggunakan pola kolaborasi ini (Gambar 4).



Gambar 4. Perubahan orientasi usaha di masa depan

Salah satu problem untuk UMKM di Indonesia adalah bagaimana mendorong ekspor seperti yang dilakukan Korea Selatan, Tiongkok, Jepang dan India. Indonesia memiliki banyak keunggulan terkait UMKM misalnya tinggi dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Sayangnya kontribusi ekspor dari UMKM masih jauh tertinggal (20%) dibandingkan negara lain, misalnya Tiongkok (70%), Jepang (54%), Korea Selatan (39%) atau India (40%).

Dalam rapat terbatas penyaluran dana desa tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Bumdes dan Bumdesma ditingkatkan kapasitasnya, lalu diintegrasikan dengan rantai pasok nasional. Sebagai penjabarannya, Direktorat Jenderal PKP telah melakukan pendekatan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta berskala nasional, agar produk Bumdes dan Bumdesma bisa terdistribusi melalui jaringan rantai pasok mereka (Gambar 5).

Sesuai arahan presiden, pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan kawasan perdesaan adalah pembangunan SDM dan infrastruktur. Untuk periode 2020-2024, visi Kemendes PDTT adalah terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Di samping itu, misinya adalah:

- a. Upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
- b. Mengembangkan ekonomi dan investasi pedesaan
- c. Harmonisasi kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal
- d. Penyelenggaraan program transmigrasi
- e. Perumusan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang meningkatkan kapasitas SDM
- f. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik.



Gambar 5. Paparan Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan, Drs. Luthfy Latief, M.Si

Target Kemendes PDTT untuk tahun 2020-2024 adalah revitalisasi 62 kawasan pedesaan prioritas nasional (KPPN), revitalisasi Bumdesma (kategori berkembang dari 200 tahun 2019 menjadi 300 tahun 2024, dan kategori maju dari 20 tahun 2019 menjadi 200 tahun 2024). Target itu diharapkan bisa dicapai dengan rencana kerja sebagai berikut:

- a. Bantuan revitalisasi Bumdesma (Unit Produksi)
- b. Pendirian sentra inkubator Prukades
- c. Penyusunan profil potensi Bumdesma
- d. Penyusunan dan pengembangan sistem registrasi Bumdesma (Th. 2019 terdata 502 Bumdesma)
- e. Penetapan indeks Bumdesma
- f. Upaya peningkatan *capacity building* (memperbanyak ketrampilan).

Secara umum, kondisi Bumdesma yang tersebar di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Teridentifikasi 502 Bumdesma, yang terdiri dari (a) 286 intervensi Direktorat Jenderal PKP (2015-2020) di lokasi KPPN dan Non KPPN, (b) 216 terdiri dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK eksPNPM) dan Inisiasi
- b. Daerah *Base Line Data* Bumdesma (sampai 2019), terdiri dari (a) 3 kategori Mandiri (b) 120 kategori Maju dan (c) 200 kategori Berkembang dan (d) 179 kategori Konsolidasi
- c. Target RPJMN 2020-2024 (Bumdesma) adalah 200 kategori Maju dan 300 kategori Berkembang.

Adapun definisi kategorisasi di atas adalah:

- a. Mandiri, memiliki kelembagaan yang kuat dan kemandirian usaha yang sehat
- b. Maju, memiliki kelembagaan yang kuat akan tetapi masih dalam tahap pengembangan kemandirian usaha
- c. Berkembang, memiliki potensi aset yang baik namun SDM dan kelembagaan masih lemah
- d. Konsolidasi, Bumdesma sudah atau baru terbentuk/berdiri namun masih memerlukan penguatan terhadap kerjasama antar desa/konsolidasi, kelembagaan dan tata kelola unit usaha.

Untuk setiap kategori, ada berbagai bentuk stimulan yang diberikan oleh Kemendes PDTT, antara lain:

- a. Pemberian stimulan bantuan peralatan dan mesin
- b. Pemberian stimulan bantuan unit usaha
- c. Pemberian stimulan bantuan tempat pemasaran
- d. Pemberian stimulan bantuan Permodalan
- e. Peningkatan Kapasitas
- f. Pembentukan Jejaring (*Networking*).

Profil Bumdesma yang berhasil mengembangkan Prukades adalah Bumdesma Ijen Mandiri yang didirikan pada 17 Desember 2019 di desa Kampung Anyar kabupaten Banyuwangi dan terdiri dari 14 desa. Bumdesma ini mengelola kawasan

perdesaan dengan tiga potensi yang sudah diidentifikasi, yaitu (1) wisata alam, (2) perkebunan rakyat kopi dan (3) peternakan kambing Etawa. Wisata alam terdiri dari keberadaan air terjun, desa adat dan pertunjukan serta atraksi khas daerah. Komoditas kopi bisa menghasilkan 569 ton per tahun. Peternakan kambing Etawa memiliki populasi 16.752 ekor, dan dikelola secara perorangan (Gambar 6).



Gambar 6. Paparan Ketua Bumdesma Ijen Mandiri Banyuwangi, Hiparta Nursalam

Beberapa bantuan yang diberikan oleh Kemendes PDTT tahun 2018 dan 2018 mendorong kemajuan Bumdesma. Sebuah Kafe Susu dikembangkan dengan adanya tambahan alat produksi, termasuk alat kemas berteknologi madya. Ada juga bantuan mesin produksi untuk pengolahan kripik. Seluruh produksi yang dihasilkan dipasarkan melalui *platform* digital, antara lain *Instagram*, *Facebook* dan *youtube.com*. Dukungan Kemendes PDTT sangat kuat dalam pengembangan usaha Bumdesma Ijen Mandiri.

Desa adalah masa depan Indonesia. Sampai Juni 2021, ada 83.381 desa dan kelurahan di Indonesia, yang masing-masing menyimpan potensi tersendiri. Sumber daya alam, yang dipadu dengan sumber daya manusia berupa kreativitas, diharapkan mampu memunculkan potensi desa menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak muda yang menjadi peserta dalam seminar ini diharapkan bisa menjadi roda penggerak masyarakat, dengan segala idealisme dan pengetahuan yang

dimilikinya. Kucuran dana besar dalam bentuk dana desa, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa.



Gambar 7. Paparan Direktur Utama PT Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa, Zainal Abidin

Zaman memang sudah berubah. Era pertanian yang dikuasai oleh para tuan tanah sudah berlalu, digantikan oleh era industri yang menjadi hegemoni para pemilik mesin-mesin industri. Era ini pun sudah pupus, dan berganti menjadi era informasi. Kini para pemilik data dan informasi menjadi pemegang arah perkembangan ekonomi dunia, jauh melebihi kekuasaan para pemilik aset berupa alat dan sarana produksi. Gojek, sebuah perusahaan yang berbekal aplikasi, tanpa kepemilikan aset berupa mobil, sepeda motor atau restoran, bisa lebih besar daripada Blue Bird, JNE atau McDonald. Mereka bisa menguasai beberapa industri sekaligus yaitu transportasi, jasa kurir, rumah makan dan sejumlah industri lainnya.

Perubahan adalah realita kehidupan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan, akan bisa tetap bertahan, tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, yang tidak mampu beradaptasi akan kehilangan relevansinya, dan menjadi sejarah. Sejumlah raksasa bisnis yang berjaya beberapa dekade lalu, perlahan bangkrut, antara lain *Kodak*, *Nokia* atau *Blackberry*. Kepemimpinan bisnis mereka digantikan oleh perusahaan berbasis data seperti *Facebook*, *Microsoft*, *Google*, *Amazon* dan sebagainya.

Dalam skala yang lebih kecil, pandemi Covid-19 ternyata menjadi berkah tersendiri bagi PT Karya Masyarakat Mandiri (KMM), sebuah perusahaan sosial yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa. Di saat banyak toko swalayan menutup gerainya karena PSBB, KMM dan para mitra petaninya justru mampu meningkatkan penjualannya hingga lima kali lipat.

Ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pandemi Covid-19. Salah satunya adalah bahwa, - diakui atau tidak, siklus belajar manusia ternyata bisa diperpendek. Kita melihat anak-anak dengan mudah menguasai penggunaan gawai, bahkan tanpa kemampuan membaca yang memadai. Prakiraan tokoh *World Economic Forum*, Klaus Schwab, yang menduga bahwa revolusi industri 4.0 bakal dimulai 2024, ternyata meleset. Beberapa cirinya muncul di awal 2020, ketika WHO mengumumkan pandemi global. Sekolah dan perguruan tinggi menutup pembelajaran tatap muka, dan berganti dengan sekolah dan kuliah online. Bahkan pembuatan vaksin yang di masa lalu membutuhkan proses belasan tahun, kini bisa dimampatkan dalam beberapa bulan saja. Larangan makan di tempat bagi rumah-rumah makan, mempercepat pergeseran budaya pesan antar melalui aplikasi yang terkoneksi dengan teknologi informasi. Bumdes dan Bumdesma, jika ingin tetap berkibar, harus beradaptasi dengan semua perubahan ini.

Dengan potensi besar yang ada di masing-masing desa, sesungguhnya yang dibutuhkan adalah anak-anak muda dengan penguasaan teknologi yang cukup tinggi, dan bisa berperan sebagai kolaborator. Mereka adalah perekat bagi masyarakat di kawasan perdesaan, yang dengan idealismenya mencoba membangun jembatan penghubung antara berbagai pemangku kepentingan. Penyatuan berbagai kepentingan bukan hal yang mudah, tapi jika sudah terwujud, jalan menuju kesejahteraan bersama bisa lebih mudah dicapai.

Seperti diungkap oleh Prof. Erani Yustika, Bumdes dan Bumdesma sudah harus bergeser ke skala industri. Pola-pola penjualan komoditas yang harganya murah, sudah harus ditinggalkan. Introduksi teknologi yang dipadu dengan kreativitas daya cipta, diharapkan bisa menghasilkan produk yang bisa diterima masyarakat luas, baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional. Kolaborasi sesuai amanah *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke 17, harus dijalin untuk menciptakan kemakmuran bersama.

Tidak ada satu organisasipun yang bisa berdiri sendiri, sehingga semua pihak harus bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Selama bertahun-tahun masyarakat desa tercerai-berai, sehingga para rentenir dan tengkulak menikmati keuntungan terbesar. Produk pertanian, peternakan dan perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat desa dibeli dengan harga murah, lalu dijual kembali dengan harga yang mahal ke pasar. Jalur rantai pasok dikuasai hanya oleh beberapa unit usaha saja. Petani, peternak dan nelayan yang bersatu, akan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Dalam pengalaman Dompot Dhuafa, ada dua program yang masih terus tumbuh dan berkembang saat ini, yaitu Tebar Zakat Fitrah (TZF) dan Tebar Hewan Kurban (THK). Dompot Dhuafa melakukan program pemberdayaan di level petani dan peternak, meningkatkan kapasitas pengetahuan sekaligus membenahi kelembagaannya. Kucuran dana yang berasal dari dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif berupa modal usaha. Hasil usaha tani dan ternaknya ditampung oleh Dompot Dhuafa dan dijual kembali dalam program TZF dan THK. Ribuan petani dan peternak berhasil diberdayakan, dan mendapatkan harga jual yang layak. Mereka juga terbebas dari kungkungan rentenir dan tengkulak.

Prof. Erani Yustika menyoroti peran negara pada dua aspek yaitu (1) membuat kebijakan regulasi yang baik, dan (2)



menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau pemerintah pusat, termasuk di dalamnya Kemendes PDTT atau lembaga pemerintah lainnya sudah mampu membuat regulasi kebijakan yang tepat, maka fungsi pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, adanya UU Desa merupakan perwujudan fungsi pertama itu. Terkait fungsi kedua, yaitu menyediakan pelayanan publik yang dibutuhkan, misalnya penyediaan tenaga pendamping desa atau pendamping kawasan perdesaan. Kalau Direktorat Jenderal PKP sudah menyediakannya, maka salah satu tugas pemerintah sudah ditunaikan.

Sebaliknya, masyarakat juga harus memahami bahwa Pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, masyarakat desa tidak lagi harus menunggu perintah atau instruksi Pemerintah seperti di masa lalu. Kepala desa bersama masyarakat yang dipimpinnya harus berinisiatif dengan kewenangan yang sudah diberikan.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pemerintah secara institusional memiliki keterbatasan. Sebaliknya, desa memiliki modal sosial yang lebih besar, termasuk kesempatan untuk menggandeng pihak lain seperti Perguruan Tinggi atau perusahaan swasta. Sayangnya, peran dua institusi itu seringkali terlupakan karena masyarakat sudah terlalu lama bergantung pada peran pemerintah.

Direktorat Jenderal PKP telah memberikan beberapa contoh Bumdes dan Bumdesma yang sudah berhasil. Ternyata keberhasilan itu bukan semata-mata karena mereka memiliki sumber daya finansial yang tinggi. Sebuah Bumdes di desa Pujon Kidul kabupaten Malang, memulai pembangunan desa wisatanya dengan IDR 10 juta. Dana Desa itu ternyata mampu menggerakkan warga desa untuk bekerja mewujudkan keinginan bersama. Komitmen perangkat desa dalam tata kelola atas program itu, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga program ini bisa berhasil. Jadi di

luar masalah dana dari pemerintah, masih banyak persoalan yang mesti dibereskan oleh masyarakat sendiri, seperti komitmen, kegigihan, inovasi, partisipasi dan sebagainya.

Kolaborasi adalah hal mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan dalam banyak ikhtiar dan kerja keseharian.

Ada tiga syarat pokok kolaborasi, yaitu:

- a. Jumlahnya jangan terlalu besar. Cukup 3 sampai 5 desa, atau maksimal 10 desa. Ini penting untuk membangun kesepahaman dengan norma dan pola pikir yang sama,
- b. Perlu homogenitas sumber daya dan kesepahaman tujuan. Perbedaan adalah rahmat, tetapi pada fase pendahuluan, menyamakan hal-hal prinsip itu penting dan butuh waktu
- c. Kolaborasi harus didasarkan pada mutual konsensus untuk mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dalam posisi yang setara. Itu berarti, harus ada kesepakatan soal konsekuensi penyertaan modal dan bagi hasil, termasuk jika usaha yang dijalankan mengalami kegagalan.

Konsep program Prukades yang sukses dilaksanakan oleh Bumdesma di era Covid-19 sudah ada, yaitu Ijen Mandiri dari Banyuwangi. Pandemi memang berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, tapi masih ada sektor yang tumbuh dan berkembang. Pemilihan produk unggulan yang tepat akan mendukung tercapainya keberhasilan Bumdes maupun Bumdesma.

Pemasaran di era digital seperti sekarang ini, tidak lagi tergantung pada jaringan yang benar-benar ada secara fisik. Pastikan produk unggulan dibutuhkan oleh masyarakat, dan promosikan di sosial media. Tentu butuh waktu untuk membuat produk anda terkenal, tapi itu bukan hal yang mustahil. Di sosial media, pasarnya seluruh dunia. Biaya atau ongkos kirim saat ini sudah sangat murah dibanding beberapa dekade lalu.



Hubungan masyarakat kecil dengan rentenir itu seperti fenomena katak rebus. Kalau seekor katak dimasukkan ke dalam bejana berisi air, lalu dipanaskan secara perlahan, hal itu tidak akan membuat katak gelisah walau suhu airnya terus naik, sampai akhirnya sang katak sudah tidak lagi bisa menyelamatkan diri. Itulah zona nyaman, tapi lama-lama membuat pelakunya tersandera seumur hidup. Sebaiknya, mulai sekarang rentenir dan tengkulak harus dihindari. Masyarakat didorong mendirikan koperasi, bergabung dengan sesama produsen agar memiliki posisi tawar yang tinggi saat menjual produk. Kerja rentenir dan tengkulak adalah memecah-belah petani, peternak dan nelayan, sehingga mereka bisa meraih banyak keuntungan besar.

5. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Bumdes dan Bumdesma memiliki potensi besar menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi kawasan perdesaan dengan menghasilkan Prukades
- b. Untuk mewujudkan Prukades berdaya saing yang tinggi di pasar, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Dukungan Pemerintah tetap diperlukan dalam berbagai program pengembangan Bumdes dan Bumdesma, tetapi kesadaran dan kemauan keras para pengelola Bumdes dan Bumdesma adalah kunci keberhasilan yang tidak tergantikan.

6. Acknowledgment

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, serta seluruh peserta yang hadir pada webinar bertema ‘Peningkatan

Produk Unggulan dalam Menggerakkan Ekonomi Perdesaan.

7. Daftar Pustaka

- [1] Mendagri. 2020. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020
- [2] Katadata. 2019. Berapa Jumlah Penduduk Perkotaan di Indonesia? <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia>. Diakses dari katadata.co.id edisi 11/09/2019 pada 15 Februari 2022
- [3] Kompas. 2012. Hampir 54 Persen Penduduk Indonesia Tinggal di Kota. <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/23/21232065/~Nasional>. Diakses dari Kompas.com edisi 23/08/2012 pada 15 Februari 2022
- [4] BPS. 2021. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik. No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021
- [5] Sekretariat Negara. 2014. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. http://www.setneg.go.id/index.php?lang=en&option=com_perundangan&id=404095&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2014
- [6] Kemenkeu. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- [7] Kemendes PDTT. 2017. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa.
- [8] Hidayah, I. 2010. Analisis Prioritas Komoditas Unggulan Perkebunan Daerah Kabupaten Buru (*Pre-eminent Commodity Preference Analysis of Plantation of Sub-Province Buru*). AGRIKA vol. 4 (1) <https://doi.org/10.31328/ja.v4i1.143>
- [9] Kemendes PDTT. 2018. PERMENDES PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- [10] Aryadji. 2017. Cara Mengusir Kemiskinan di Desa: Prukades! Diakses dari <http://www.berdesa.com/cara-mengusir-kemiskinan-desa-prukades/> edisi 07/11/2017 pada 16 Februari 2022
- [11] Kemendes PDTT. 2019. Rancangan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020-2024

